



DEWAN MARTINUS SUDARNO MENDINGI:

Oknum Jaksa Sekadau Diduga Punya 'Paket' Semryan Perkara

PONTIANAK-RK. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno, naik darah setelah mendengar aduan konstituenya di Kabupaten Sekadau ihwal aksi oknum jaksa yang diduga doyan memeras kon- traktor setempat.

"Waktu saya meres, banyak teman-teman mengeluh ke saya," beber Martinus Sudarno kepada wartawan, di kom- plek DPRD Provinsi Kalbar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak Selatan, Senin (14/3).

Menurut dia, akbar ulah tak terpuji oknum jaksa tersebut, di kabupaten berjuluk Bumi Lawang



Martinus Sudarno

Kuaritu, banyak panitia lelang dan konsultan proyek ogah mengerjakan tugasnya. Takut.

"Biasanya tengah mengerjakan suatu proyek malah dipanggil jaksa terus. Bahkan belum kerja saja sudah ada yang dipanggil jaksa," sesalnya.

Dewan Kalbar dari Dapil Sanggau-Sekadau ini ber- pendapat, kebiasaan oknum Korps Adhyaksa itu muncul setelah sejumlah kontraktor yang gagal mendapatkan proyek 'memanas-manasi' mereka. "Ada yang kalah tender terus lapor ke jaksa," sebut pria yang karib disapa Darno itu.

■ Halaman 15



Oknum Jaksa Sekadau Diduga Punya 'Paket' Senyap Perkara

Ia mengatakan, cara-cara yang digunakan pun tak berbeda. Asal panggil tanpa surat resmi dan lembaran kejaksaan. "Masak mau manggil kontraktor pakai mulut orang. Harus pakai suratlah, sesuai dengan proses hukum. Jangan asal panggil seperti orang di warung kopi, getarnya."

Jadi, Darmo berkesimpulan, kerja oknum jaksa di Sekadau tak sesuai dengan UU. "Proyek kan baru bisa diperiksa, jika sudah selesai dikerjakan. Banyak masyarakat kita belum mengerti hukum, jadi bisa dilolotongi jaksa-jaksa itu. Getaran saya," lugas dia.

Ia memanti model jaksa-jaksa semacam itu, jangan lagi berantiberanti menyertur masyarakat dalam hal ini kontraktor. Sebelum jaksa turun tangan, ada Inspektorat dan Badan Pengawas Kelangkaan (BPK) yang memeriksa suatu proyek.

"Kontraktor itu pun tidak bisa langsung dipanggil. Tunggu hasil audit keluar dulu. Misalnya ditemukan salah administrasi dan kekurangan pengertian. Kontraktor pasti diberi tenggang waktu untuk melengkapinya. Minstrasi dan memperbaiki keyasan mereka," jelas Darmo.

Apabila temuan Inspektorat dan BPK tidak ditindaklanjuti oleh kontraktor, barulah bisa dikatakan beres. "Kalau diminta perbaikan tapi tidak dikerjakan, baru bisa diproses hukum. Kita mau jaksa itu kerjasama dengan hukum dan kerennan yang berlaku," serunya.

Darmo menggunakan, modulus yang dipakai jaksa selama ini adalah mencari-cari kesalahan dan menakar orang. "Selain warga merasakan, oknum jaksa pun akan menawarkan 'paket'. Ada tiga 'paket' yang ditawarkan oknum jaksa.

Pertama, perkara dituntaskan dengan paa-pasal bertapis. Jaminannya, kontraktor hanya akan dipanggil secara lisan saja. Kedua, perkara didapatkan tapi sewaktu-waktu bisa ditundukkan ke publik. Ketiga, berkas perkara dicabut dan kasus tidak ditindaklanjuti. Masing-masing paket punya tarif yang berbeda.

"Teman-teman tidak mau menakan berapa ongkos setoran. Yang jelas, cabut berkas lebih besar biayanya," beber Darmo.

Mendekatkan temuan ini, ia mengimbau seluruh masyarakat Sekadau dan Kalbar untuk tidak takut jika oknum jaksa mengancam. "Bagi kontraktor yang dipanggil jaksa dengan cara-cara tidak sesuai hukum, jangan mau datang."

Mantan konsultan hukum ini menganalisa, ulah jaksa itu karena mereka terbebani dengan biaya

hidup yang besar. "Dimana jaksa bertugas, sebaknya keharuga diabaikan. Siapa yang tidak membuntukan biaya tinggi, ngisi dua dapur. Belum lagi biaya transportasi pulang ke

rumah asal. Kalau gini kecil, gimana mau hidup. Ujung-ujungnya meras," duga Darmo.

Selain itu, konon, ada perintah dari atasan yang terkeasan tidak rasional, yakni kejar target meneari perkara. "Kan aneh," tumpunya.

Laporan: Deska Inmaspatara
Editor: Mohammad Iqbal